

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.



RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan sasaran pembangunan jangka panjang daerah sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Lampung Timur yang disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode dalam RPJMD.

Pada akhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2011-2015, upaya pembangunan daerah melalui prioritas-prioritas pembangunan telah menghasilkan berbagai capaian yang umumnya berada pada jalur yang diharapkan. Meskipun demikian, beberapa hal juga belum dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan dan memerlukan percepatan dalam memenuhi indikator kinerja yang ada.

1. Dalam melaksanakan Misi 1 dengan prioritas pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat telah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,10 (2012) menjadi 66,42 (2014).
 - a. di bidang pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) telah dapat ditingkatkan dari 93,74% (2012) menjadi 95,07% (2014). Angka rata-rata lama sekolah berhasil melampaui target dari 7,01 tahun menjadi 7,16 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD melampaui target dari 102,21 menjadi 112,91; APK SLTP tercapai 82,53%; dan APK SLTA tercapai 68,56%; Angka Partisipasi Murni (APM) SD tercapai 98,81%; APM SLTP tercapai 72%; APM SLTA tercapai 54,29%.
 - b. di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 68,94 (2012) menjadi 69,33 pada Tahun 2014. Angka Kesakitan masyarakat dapat diturunkan 13,65% menjadi 12,9%. Rasio sarana kesehatan yang meningkat adalah Poskesdes dari 8,93 (2010) menjadi 26,11 (2014). Sedangkan rasio tenaga kesehatan pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.
 - c. di bidang keluarga berencana, jumlah Keluarga Prasejahtera dapat diturunkan meskipun belum mencapai target, demikian juga dengan Keluarga Sejahtera I jumlahnya dapat diturunkan. Sementara jumlah Keluarga Sejahtera II dan III dapat ditingkatkan dengan capaian 99,47%.
 - d. di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) terjadi peningkatan dari 4,21% (2011) menjadi 5,00% (2014).
 - e. upaya penurunan angka ketergantungan penduduk yang tidak bekerja terhadap penduduk yang bekerja belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat ketergantungan penduduk yang tidak bekerja masih sekitar 50,5%, atau tercapai sekitar 98,62%.



2. Dalam melaksanakan Misi 2 dengan prioritas pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perdagangan, industri, UMKM, kepariwisataan, dan pertambangan, yaitu:
 - a. PDRB terjadi peningkatan rata-rata 5,18% pertahun dan melampaui target yaitu 100,2%. Laju pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan yaitu hanya tercapai sekitar 83,89%.
 - b. PDRB perkapita penduduk terdapat peningkatan rata-rata 11,52% pertahun dengan tingkat capaian 66,50%.
 - c. kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB melampaui target sebesar 114,23%;
 - d. di subsektor perkebunan hanya produksi kelapa sawit yang menunjukkan melampaui target sekitar 215,47%;
 - e. di subsektor peternakan produksi daging dan telur melampaui target;
 - f. kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tercapai 97,79%
 - g. kontribusi sektor pertambangan cenderung menurun sekitar 5,10 per tahun;
 - h. kunjungan wisatawan ke Lampung Timur menurun.
3. Dalam melaksanakan Misi 3, sasaran yang ingin dicapai adalah perkembangan ekspor non migas, peningkatan investasi, tingkat keamanan dan ketertiban, serta perkembangan agroindustri, dengan capaian sebagai berikut :
 - a. Jenis industri yang memiliki nilai produktivitas tertinggi peningkatannya adalah Industri Logam Mesin dan Elektronik (ILME) rata-rata sebesar 22,56% pertahun. Sedangkan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) rata-rata 17,53% pertahun dan Industri Kimia dan Aneka rata-rata 14,49% pertahun.
 - b. terjadi peningkatan investasi rata-rata 53,52% pertahun dan investasi di bidang industri agro rata-rata meningkat 9,20% pertahun.
 - c. Penurunan angka kriminalitas tidak mencapai target, pada Tahun 2012 angka kriminalitas sebanyak 212 kasus, pada Tahun Tahun 2013 meningkat menjadi 541 kasus dan pada Tahun 2014 kembali meningkat menjadi 727 kasus.
4. Dalam melaksanakan Misi 4, dengan prioritas meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan capaian sebagai berikut :
 - a. di bidang perencanaan pembangunan, seluruh dokumen perencanaan dapat disusun seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah meningkat rata-rata 14,60% per tahun. Pertumbuhan PAD meningkat rata-rata 39,63% pertahun lebih tinggi daripada sumber pendapatan daerah lainnya.
 - c. PNS yang tamat SD (golongan I) terus mengalami penurunan rata-rata sekitar 23%, demikian juga tingkat SLTP dan SLTA terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan tren yang baik, sementara jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang



- ditamatkan seperti Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2) terus meningkat rata-rata 6% dan 16%.
- d. dari berbagai jenjang pendidikan PNS Lampung Timur hingga tahun 2014 didominasi PNS dengan jenjang pendidikan S1/D4 sebesar 45,5%, D2 (Akta II) sebesar 25,63% dan SLTA sebanyak 16,16%.
5. Dalam melaksanakan Misi 5 di sektor kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan dan keagamaan:
- di bidang kesejahteraan sosial angka kemiskinan terjadi penurunan dari 19,66% (2011) menjadi 17,05% (2014);
 - tingkat partisipasi pilkada pada Tahun 2015 sebesar 60,89%.
6. Dalam melaksanakan Misi 6 di sektor infrastruktur, prasarana dan sarana, perhubungan, dan lingkungan hidup:
- jalan kewenangan kabupaten kurang mantap (tingkat kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 42,58%), tidak mencapai target yang ditetapkan.
 - Jumlah terminal yang berfungsi dengan baik 1, tidak mencapai target 2 terminal.
 - jumlah pengguna air bersih dari PDAM relatif tetap;
 - degradasi lahan khususnya eks lokasi pertambangan pasir di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib, Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah).

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.

- Rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,16 tahun;
- Angka buta huruf masih cukup tinggi yaitu 4,93%;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan;
- Angka Partisipasi Murni (APM) semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan;
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun baru mencapai 99,7 persen;
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 13-15 tahun baru mencapai 95,97 persen.
- Rasio guru telah ideal, namun distribusi belum merata.

2. Kesehatan.

- ▮ Angka Harapan Hidup perlu terus ditingkatkan.
- ▮ Belum terakreditasinya pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit;



- Ñ Meningkatnya kasus kematian bayi yaitu 80 kasus pada Tahun 2013 menjadi 91 kasus (2015);
- Ñ Masih tingginya kasus kematian ibu (12 kasus) pada Tahun 2014;
- Ñ Prevalensi balita kurang gizi mencapai 18,8%;
- Ñ Rasio Puskesmas 3,4 per 100.000 penduduk
- Ñ Rasio dokter 8 per 100.000 penduduk;
- Ñ Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan baru mencapai 49%;
- Ñ Insiden rate kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk mencapai 26,4%;
- Ñ Perlu dilaksanakan penatalaksanaan kasus kronis filariasis;
- Ñ Perlu upaya dalam rangka menurunkan prevalensi hipertensi.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Ñ 146,13 km atau 7,76% jalan kabupaten dalam kondisi berupa jalan tanah;
- Ñ 573,66 km atau 30,45% jalan kabupaten dalam kondisi berupa jalan batu/onderlaagh.
- Ñ Kondisi mantap jalan kabupaten baru mencapai 42,58% atau sepanjang 801,51 km;
- Ñ Jalan kabupaten sepanjang 1.082,66 km dalam kondisi rusak sedang dan berat;
- Ñ 1.405,63 km jalan desa dalam kondisi berupa jalan tanah;
- Ñ 2.211,69 km jalan desa dalam kondisi berupa jalan batu/onderlaagh
- Ñ Drainase permukiman belum tersedia secara optimal;
- Ñ Trotoar kawasan perkotaan belum tersedia secara merata;
- Ñ Diperlukan pembangunan jembatan penghubung di beberapa lokasi;
- Ñ Perlu upaya meningkatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Ñ Belum optimalnya infrastruktur bidang sanitasi bagi masyarakat;
- Ñ 8 desa di 5 kecamatan merupakan kawasan kumuh yang perlu penanganan;
- Ñ Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, dan lain sebagainya;
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan rata-rata luas lantai rumah tinggal.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Angka kriminalitas relatif tinggi dan berkencenderungan meningkat, dimana pada Tahun 2014 terjadi 727 kasus kriminalitas;
- Perlu upaya dalam meningkatkan cakupan penegakan perda dan perbup;
- Siskamling belum berjalan secara optimal di setiap tingkatan wilayah;

6. Sosial

- Penduduk miskin mencapai 170,73 ribu jiwa



- Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
- Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Perlu upaya dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- Perlu upaya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Perlu upaya dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui penyediaan lembaga pelatihan tenaga kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan di beberapa desa;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih belum optimal;

3. Pangan

- Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat;

4. Pertanahan

- Pembangunan infrastruktur fisik seringkali terkendala dengan ketersediaan lahan;
- Tanah milik pemerintah daerah belum seluruhnya bersertifikat;
- Konflik di bidang pertanahan masih sering terjadi di masyarakat;

5. Lingkungan Hidup

- Ñ Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
- Ñ Ancaman terhadap degradasi lingkungan hidup akibat ketidakdisiplinan dalam pemanfaatan ruang;
- Ñ Peningkatan resiko bencana alam akibat ketidakdisiplinan pemanfaatan lahan;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Penduduk yang memiliki KTP elektronik baru mencapai 75%;
- Penduduk yang memiliki akta kelahiran baru mencapai 75%;
- Diperlukan pelayanan administrasi kartu identitas untuk anak;

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Badan usaha milik desa perlu ditingkatkan jumlahnya;
- Kompetensi kader posyandu perlu ditingkatkan.
- Aparatur desa belum maksimal dalam pemahaman dan implementasi UU Desa;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa, terutama dalam akuntabilitas dana desa;
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses dan memperluas ekonomi perdesaan;
- Belum seluruh desa menggunakan *e-budgeting*;

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Ñ Perlu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,97.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi;
- Ñ Perlu upaya dalam menurunkan angka *unmeet need*.

9. Perhubungan

- Ñ Jumlah kecelakaan lalu lintas akibat berbagai faktor relatif tinggi.
- Ñ Infrastruktur bidang transportasi belum tersedia secara berkualitas dan merata;

10. Komunikasi dan Informatika

- Ñ Publikasi terhadap capaian pembangunan daerah belum optimal;
- Ñ Perlu adanya sarana komunikasi radio milik pemerintah daerah;
- Ñ Pemanfaatan teknologi informasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal;

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Ñ Perlunya peningkatan jumlah koperasi aktif.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan jumlah UMKM.

12. Penanaman Modal

- Ñ Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum optimal;
- Ñ Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- Peran serta pemuda dalam pembangunan perlu ditingkatkan;

- Pelatihan dan pembinaan terhadap pemuda guna menumbuhkan semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan perlu ditingkatkan;
- Kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani perlu ditingkatkan salah satunya melalui pemasyarakatan olahraga;
- Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda perlu digalakkan;
- Peningkatan prestasi di bidang olah raga;
- Pembangunan sarana/fasilitas olahraga skala daerah perlu segera dilaksanakan.

14. Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya.

15. Perpustakaan

- Sarana dan prasarana perpustakaan daerah belum maksimal;
- Jumlah perpustakaan desa perlu ditingkatkan;
- Sarana dan prasarana perpustakaan desa belum maksimal;
- Budaya literasi masyarakat perlu ditingkatkan;
- Jumlah pengunjung perpustakaan daerah belum optimal;

16. Kearsipan

- Database informasi kearsipan belum optimal dilaksanakan;
- Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip daerah belum maksimal;
- Pengelolaan administrasi kearsipan PD belum optimal;



C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- Perlu upaya meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- Perlu upaya dalam meningkatkan konsumsi ikan perkapita

2. Pariwisata

- Perlu upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan;
- Kondisi jalan menuju destinasi wisata belum mantap;
- Ketersediaan sarana dan prasarana objek wisata belum maksimal;
- Promosi bidang kepariwisataan perlu ditingkatkan;

3. Pertanian

- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan produksi sektor peternakan
- Ñ Perlu upaya dalam meningkatkan ketersediaan air dalam pengelolaan pertanian.
- Ñ Ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian tidak mencukupi;
- Ñ Kemandirian petani dalam penyediaan benih dan pupuk belum optimal;
- Ñ Lemahnya akses petani dan nelayan terhadap permodalan, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Ñ Pengembangan komoditas unggulan dan peremajaan tanaman tua;
- Ñ Pengendalian hama penyakit tanaman belum terpadu dan maksimal;
- Ñ Keterbatasan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian;
- Ñ Sarana dan prasarana aparatur bidang pertanian pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan penyuluhan belum maksimal;
- Ñ Ancaman gangguan hewan liar (gajah) khususnya di wilayah desa penyangga Taman Nasional Way Kambas.

4. Perdagangan

- Pengawasan kemetrologian perlu ditingkatkan;
- Upaya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya perlu ditingkatkan.
- Pemberdayaan potensi pasar daerah perlu ditingkatkan;
- Pengawasan pupuk bersubsidi;
- Upaya penataan pasar daerah perlu dioptimalkan;
- Pengelolaan aset pasar perlu ditingkatkan;
- Retribusi pasar daerah belum optimal.

5. Perindustrian

- Pengembangan sentra-sentra industri potensial berbasis produk unggulan daerah perlu ditingkatkan;
- Pelayanan akses sarana informasi perindustrian perlu ditingkatkan;
- Pembinaan terhadap IKM dirasa masih kurang;
- Perlu ditingkatkan pelayanan fasilitasi HAKI kepada IKM;

6. Transmigrasi

- Fasilitasi terhadap calon transmigran perlu ditingkatkan;
- Upaya monitoring terhadap transmigran perlu ditingkatkan.

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

- Target laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak tercapai;
- Belum optimalnya daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen IPM;
- Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia;
- Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal;
- Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal;
- Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan.

2. Keuangan

- Porsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur terhadap APBD masih di bawah 10%.
- Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi.
- Peningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Sumber pembiayaan pembangunan relatif belum bervariasi;

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan pemerintah;
- Kinerja aparatur perlu ditingkatkan.

4. Pemerintahan Umum

- Pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat.
- Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal;
- Sistem remunerasi berbasis kinerja yang masih belum terimplementasi dengan baik;
- Desa dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan skala lingkungan atau di tingkat masyarakat;
- Transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai;
- Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini;
- Jumlah SDM APIP yang bersertifikat perlu ditingkatkan;
- Tindaklanjut terhadap temuan BPK/BPKP/Irjen oleh PD perlu ditingkatkan;

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kabupaten Lampung Timur.
2. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempengaruhi Kabupaten Lampung Timur.
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025.
 - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ini ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini,

1. Kriteria-1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Kriteria-2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Kriteria-3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Kriteria-4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;



5. Kriteria-5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Kriteria-6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan daerah. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Lampung Timur.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2019, yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari ketujuh Misi tersebut, misi pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Lampung Timur.

Selanjutnya, untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**.



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada setiap agenda prioritas, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Lampung Timur, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2019.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD).



Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 9) Bidang Pekerjaan Umum.
- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

3. Sustainable Development Goals (SDG's)

Pengertian SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals*, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Terdapat banyak tujuan dari konsep SDGs, namun ada tiga tujuan yang dapat dirangkum : *Pertama*, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. *Kedua*, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. *Ketiga*, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau *human development* yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau *environmental development* berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.



4. Proyek Strategis Nasional

Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Jaksa Agung; Kapolri; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Presiden; Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

a. Pembangunan Bendungan Sukaraja III

Pembangunan bendungan Sukaraja III di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu proyek strategis nasional pembangunan 13 bendungan baru sampai dengan Tahun 2019 dengan total daya tampung air mencapai 894,2 juta meter kubik.

Badan Bendungan Sukaraja III direncanakan berlokasi di Desa Negeri Jemanten dan Desa Tri Sinar Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dengan koordinat 4°37'00"-5°37'00" LS, 105°15'00"-106°20'00" BT. Pembangunan bendungan ini diperkirakan akan memiliki panjang kurang lebih 315, tinggi kurang lebih 24 meter (lebar puncak 7 meter), dengan luas daerah genangan kurang lebih 1.754 hektar.

Sedangkan daya tampung air diperkirakan kurang lebih 113.910.000 meter kubik. Peruntukkan utama bendungan adalah untuk pengairan, dengan lahan basah terdampak 202 hektar (Kecamatan Metro Kibang), 4.262 hektar (Kecamatan Batanghari), 3.789 hektar (Kecamatan Sekampung), dan 887 hektar (Kecamatan Marga Tiga).

Tahapan pembangunan Bendungan Sukaraja III telah dimulai pada Tahun 2003 yaitu studi identifikasi potensi oleh Konsultan Nippon Koei Co. Pada Tahun 2013 tahap *Feasibility Study* dan DED, dan pada Tahun 2016-2019 akan dilaksanakan pembebasan lahan. Diperkirakan pada Tahun 2017 akan dimulai pembangunan konstruksi, dengan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi diperkirakan paling sedikit 347 orang, Diperkirakan pada Tahun 2019 akan mulai beroperasi secara bertahap.

Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung, konstruksi Bendungan Sukaraja III terdiri dari tubuh bendungan/bangunan bendungan, bangunan pelimpah (*spillway*) corong dan berpintu, bangunan pengelak (*conduit*) dan bangunan pengambilan (*intake*).

Pembangunan bendungan ini tentu saja akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Dimana keberadaan bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pasokan irigasi



daerah yang dapat meningkatkan produksi tanaman pertanian khususnya tanaman pangan, peningkatan pasokan air minum, sebagai tempat rekreasi, penghasil tenaga listrik, serta dapat meningkatkan aspek-aspek lingkungan tertentu.

b. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Tol Trans Sumatera terdiri dari 23 ruas yang melintasi 9 Provinsi di Sumatera. Pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp.360 triliun. Dari 23 ruas tersebut, 15 ruas koridor utama dan 8 ruas lainnya di koridor pendukung. Untuk tahap pertama, pemerintah menetapkan empat ruas, yaitu ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Pekanbaru-Dumai. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah membangun proyek Jalan Trans Sumatera adalah:

- 1) Terbangunnya infrastruktur akan memberikan dampak pengganda atau *multiplier effect* pada daerah yang dibangun.
- 2) Tol Tans Sumatera diharapkan membangkitkan ekonomi Sumatera terutama dalam hal penyumbang PDB nasional.
- 3) Sebagai bagian mendukung terciptanya *Asian Highway Network* atau Jalan Asia yang telah disepakati pada forum United Nations di Shanghai, China.
- 4) Dalam beberapa tahun terakhir Sumatera mengalami pertumbuhan dalam kontribusinya sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar kedua setelah Jawa.
- 5) Sumatera memiliki peran regional dalam pembentukan PDB yang meningkat dari tahun ke tahun, di sisi lain justru Jawa mengalami penurunan dalam PDB Nasional.
- 6) Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi regional, Sumatera mutlak memerlukan sarana pendukung berupa sarana transportasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya.
- 7) Dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sumatera diharapkan menjadi gerbang utama perekonomian Indonesia untuk pasar Afrika, Asia, Eropa, serta Australia.
- 8) Jalan Lintas Sumatera saat ini dalam kondisi parah dan mengkhawatirkan untuk moda transportasi darat lintas provinsi.
- 9) Moda transportasi darat masih menjadi pilihan utama untuk mendukung kegiatan perekonomian di Sumatera.
- 10) Merupakan sarana penghubung antar provinsi yang paling efektif dan terjangkau.

Untuk ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar direncanakan akan memiliki 6 gerbang tol dan 2 *barrier gate*, yaitu Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Jatimulyo, Gunung Sugih 1, Gunung Sugih 2, dan Bandar Jaya. Dengan adanya gerbang tol yang berbatasan dengan beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, perlu dipikirkan secara cermat bagaimana mengoptimalkan keuntungan pembangunan jalan

tol tersebut agar dapat dirasakan oleh Kabupaten Lampung Timur. Tidak harus berupa keuntungan langsung dari pembangunan jalan tolnya, namun memaksimalkan manfaat keberadaan jalan tol agar dapat memacu pembangunan dan investasi di sektor lain, yang kemudian memberikan manfaat besar bagi daerah.

4.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019

Pemerintah Provinsi Lampung berkehendak menjadikan visi pembangunan daerah sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Provinsi Lampung dalam periode 2015-2019. Visi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 adalah "*Lampung Maju dan Sejahtera 2019*".

Untuk mewujudkan visi pembangunan RPJMD Provinsi Lampung tersebut, ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

4.2.3 Kajian Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah, maka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen rancangan RPJMD masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 4.1
Identifikasi Isu Strategis/Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Kota Metro	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Tengah	Keterkaitan	Kabupaten Lampung Selatan	Keterkaitan
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pendidikan dan kesehatan guna memacu peningkatan kualitas/aksesibilitas	Peningkatan ekonomi berbasis agribisnis dengan didukung industri	Perlu ditingkatkan kerjasama dalam hal distribusi dan pasokan bahan baku industri	Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dan Terminal Agribisnis	Kerjasama dan pengembangan wilayah/kawasan/kecamatan yang berdekatan dengan pembangunan kawasan strategis



	pendidikan dan kesehatan Lampung Timur.		(industri berbahan baku karet dan kelapa sawit banyak berada di Lampung Tengah)		nasional dan daerah
Pengembangan literasi pangan (keamanan dan keragaman pangan).	Kota Metro dapat menjadi pangsa pasar potensial bagi produk pertanian dan perikanan Lampung Timur				

4.2.4 Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi pembangunan yang telah disusun merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh seluruh *stakeholders* sampai tahun 2025. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi Kabupaten Lampung Timur menjadi visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan potensi wilayah, tantangan yang dihadapi sampai tahun 2025, serta mengacu pada Visi Provinsi Lampung 2005-2025 dan Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 adalah “*Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan*”.

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang sebagai implementasi visi dan misi Kabupaten Lampung Timur disusun dalam 4 (empat) tahapan sesuai dengan periode dalam RPJMD. Misi dan sasaran pembangunan pada periode lima tahunan Tahap Ketiga adalah sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Timur

- 1) Pembangunan wilayah berdasarkan Perda Tata Ruang.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
- 4) Perluasan pengembangan UMKM.
- 5) Optimalisasi berbagai sumber PAD.
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata.
- 7) Perluasan jangkauan Jaminan Sosial Kemiskinan.
- 8) Perluasan jangkauan perlindungan wanita dan anak.
- 9) Perluasan pengembangan pemuda dan olahraga.
- 10) Perluasan kualitas permukiman.
- 11) Peningkatan kualitas produk pertanian
- 12) Perluasan dan peningkatan kualitas Program Pendanaan Agribisnis
- 13) Peningkatan kualitas infrastruktur pertanian
- 14) Peningkatan kualitas sentra perdagangan dan jasa
- 15) Peningkatan kualitas perkreditan rakyat
- 16) Peningkatan kualitas industri hasil pertanian



Misi II : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) Kabupaten Lampung Timur secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku

- 1) Memantapkan kualitas Pemilukada.
- 2) Mengembangkan mekanisme pengawasan, enumerasi, *reward and punishment* yang terukur dan terbuka.
- 3) Mempertahankan kualitas kebijakan *good and clean government*, serta penggunaan mekanisme *fit and proper test* sebagai proses standar dalam penetapan dan pengangkatan pejabat publik.
- 4) Akselerasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.

Misi III : Mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional

- 1) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan darat, sungai, dan laut.
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur sosial kemasyarakatan.
- 3) Peningkatan kualitas perumahan rakyat yang terjangkau.
- 4) Pengembangan sarana pelabuhan sungai dan laut.
- 5) Peningkatan kuantitas fasilitas komunikasi.
- 6) Peningkatan kuantitas fasilitas listrik untuk pengembangan listrik rumah tangga dan industri.
- 7) Peningkatan dan perluasan pelayanan sarana air bersih.

Misi IV : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan

- 1) Pengembangan kawasan pembangunan sarana pendidikan.
- 2) Peningkatan kualitas sarana pendidikan yang direhabilitasi dan direkonstruksi.
- 3) Pengembangan pelatihan dan studi banding tenaga pengajar yang berkualitas.
- 4) Pengembangan hasil riset dan dari berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- 5) Pengembangan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.
- 6) Pengembangan derajat kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum

- 1) Penerapan secara konsisten peraturan daerah bidang pertanahan.
- 2) Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kriminal masa depan, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang.
- 3) Peningkatan kualitas masyarakat yang taat hukum.
- 4) Peningkatan kualitas konsistensi pelaksanaan regulasi yang dapat menciptakan pertumbuhan kegiatan investasi di Lampung Timur.



Misi VI : Membangun masyarakat Religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah

- 1) Pengembangan kuantitas rehabilitasi sarana-sarana peibadatan umat beragama.
- 2) Pengembangan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 3) Pengembangan pembinaan karakter dan jati diri masyarakat.
- 4) Eksplorasi dan pengembangan berbagai ragam budaya dan seni daerah dari berbagai sub etnis.
- 5) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat.
- 6) Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang multi etnis.

Misi VII : Mengoptimalkan sumberdaya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup

- 1) Optimalisasi pengelolaan dan penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukan dan rencana tata ruang.
- 2) Melarang alih fungsi lahan, menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan hidup.
- 3) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan berbagai kawasan lindung dan cagar budaya.
- 4) Mempertahankan luas hutan dan mengoptimalkan produksi hutan yang berasal dari hasil hutan non kayu dan hutan kemasyarakatan.
- 5) Perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan sumber air dan sungai.
- 6) Peningkatan kualitas perekonomian kawasan pesisir.
- 7) Pemanfaatan dan optimalisasi informasi endapan geologi.

4.3 Penetapan Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Lampung Timur dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Lampung Timur. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran PD selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan maka dapat diidentifikasi 6 (enam) isu strategis Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Infrastruktur;
2. Pertanian;
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Penanggulangan kemiskinan;



5. Sosial, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana;
8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumber daya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan daerah.

1. **Infrastruktur**

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar penduduk juga semakin dekat dan membuka isolasi bagi masyarakat yang terbelakang.

Berdasarkan data pada Tahun 2015, jalan kabupaten sepanjang 146,13 km atau sekitar 7,7% masih berupa jalan tanah dan sepanjang 573,66 km atau 30,45% dalam kondisi jalan batu/onderlaagh. Terkait dengan kemantapan jalan kewenangan kabupaten, pada Tahun 2015 baru 42,58 persen yang berada dalam kondisi mantap dari 1.884,17 km jalan yang ada. Sekitar 57,42 persen atau sepanjang 1.082,66 km dalam kondisi rusak sedang maupun berat. Kondisi jalan kewenangan kabupaten yang rusak tersebut telah menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Lampung Timur dan sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Hal ini makin diperparah dengan masih belum mantapnya jalan kewenangan provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Lampung Timur. Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten perlu mendapat prioritas dari pemerintah daerah, begitu juga dengan akses jalan yang menuju destinasi wisata.

Peningkatan kemantapan jalan kabupaten dan desa tersebut juga perlu dibarengi dengan terwujudnya sistem transportasi publik yang mantap dan merata. Sistem transportasi publik yang mantap dan merata, dengan dibarengi oleh ketersediaan



fasilitas lalu lintas dapat mendorong aksesibilitas antar wilayah dan distribusi barang/jasa.

Selanjutnya, di bidang permukiman, berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur masih terdapat 8 desa di 5 kecamatan yang termasuk dalam daerah permukiman kumuh, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan wilayah permukiman kumuh dapat dilakukan melalui bantuan/fasilitasi perbaikan rumah, pembangunan sarana sanitasi dan lain sebagainya.

Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur permukiman melalui pembangunan penerangan jalan umum, pembangunan gedung/pos keamanan, dan pembangunan ruang terbuka hijau/zona kreatif warga di tiap kecamatan perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta kreativitas warga.

Upaya menjaga ketersediaan sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri juga perlu terus ditingkatkan, seperti peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi, penataan kawasan sempadan sungai dan penyediaan air baku permukiman.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut, harus tetap mentaati rencana tata ruang daerah yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam pengembangan wilayah, perlu ditetapkan rencana detail tata ruang wilayah perkotaan sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Sedangkan terkait dengan upaya pengembangan kawasan ibukota kabupaten serta wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu disusun dokumen pengembangan kawasan ibukota serta pengembangan wilayah khususnya yang berbatasan/berdekatan dengan rencana pengembangan kawasan strategis nasional (jalan tol), diharapkan dengan keberadaan jalan tol di Provinsi Lampung dapat memberikan manfaat bagi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peran strategis dalam struktur pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian merupakan penopang terbesar bagi perekonomian Lampung Timur, sebesar 35,61 persen PDRB kabupaten ini disumbang dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Pertumbuhan pada kategori pertanian memberikan sumbangan paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung Timur secara keseluruhan. Tingginya sumbangan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi dapat menjadikan sektor tersebut sebagai pemicu pertumbuhan di masa datang, artinya stimulus pada



sektor tersebut dapat memberikan peningkatan yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur. Disamping itu, peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah dapat juga sebagai penyerap tenaga kerja, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Lampung Timur perlu diarahkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan kemandirian petani menuju pertanian berkelanjutan.

Selanjutnya, juga perlu dilaksanakan upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah, melalui penganeekaragaman pangan serta pengendalian keamanan dan distribusi pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi daerah karena jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang cukup besar. Diharapkan kemandirian pangan yang menjadi upaya pemerintah daerah dapat terwujud dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Pembangunan di sektor pertanian perlu juga memperhatikan potensi ancaman yang bersumber dari hewan liar, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas. Kurun waktu tiga tahun terakhir ditemukan berbagai kasus kejadian konflik manusia dan gajah, yang mengakibatkan kerugian bagi para petani akibat rusaknya lahan pertanian. Perlu upaya pemerintah sesuai dengan kewenangannya untuk mengantisipasi gangguan tersebut.

3. Pariwisata dan ekonomi kreatif

Berdasarkan data, jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2015 mencapai 71.453 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut diyakini masih dapat ditingkatkan, mengingat masih belum optimalnya pengelolaan sektor kepariwisataan maupun pengembangan ekonomi kreatif selama ini. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur, dengan berbagai destinasi wisata yang layak untuk dikembangkan dengan didukung sumber daya manusia yang potensial. Pengembangan sektor pariwisata dipastikan memiliki *multiplier effect* yang sangat luas, karena usaha-usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan banyak sektor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi rakyat. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang meningkatkan jumlah negara yang mendapat fasilitas bebas visa, merupakan peluang dalam meningkatkan pariwisata daerah. Destinasi wisata yang



berdaya tarik tinggi yang dikelola secara profesional disertai dengan penyelenggaraan even kepariwisataan berskala nasional maupun regional yang dibarengi dengan promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, Pencanangan Tahun Kunjungan Kabupaten Lampung Timur (*Visit East Lampung Year*) juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pengembangan potensi pariwisata daerah tersebut juga perlu disertai dengan pengembangan industri kreatif sehingga bisa maju dan tumbuh bersama saling mendukung. Dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), diharapkan Kabupaten Lampung Timur juga dapat menangkap peluang besar ini melalui berbagai upaya peningkatan potensi ekonomi berbasis produk unggulan daerah. Kekayaan alam, budaya dan manusia dapat menghasilkan potensi besar ketika digabungkan dengan kreativitas sehingga dapat memberikan sumbangsih tidak saja bagi perekonomian daerah, namun juga dalam penguatan citra dan identitas daerah. Pengembangan ekonomi kreatif maupun produk unggulan daerah perlu dibarengi dengan peningkatan peran koperasi dan UMKM, penciptaan iklim berusaha yang kondusif dan pemberian kemudahan investasi, serta peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi.

4. Penanggulangan kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2009-2014 meskipun terus mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase, namun berdasarkan data (2014) jumlah penduduk miskin di Lampung Timur (170,73 ribu jiwa) merupakan yang terbesar di Provinsi Lampung. Selama ini terlihat bahwa penanggulangan kemiskinan sering tidak tepat sasaran dikarenakan data penduduk miskin tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan data/profil kemiskinan secara akurat (*by name by address*), sehingga penanganan terhadap masyarakat miskin dapat efektif dan tepat sasaran. Selain itu, perlu disusun strategi yang tepat guna penanggulangan kemiskinan daerah. Peningkatan wewenang dan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu didorong guna meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan bagi penduduk miskin, di samping mendorong pendapatan juga perlu dari sisi pengeluaran (pelayanan/bantuan bagi masyarakat miskin). Pelayanan kesehatan, pelayanan KB, serta penyaluran bantuan bagi rakyat miskin sangat perlu dilakukan guna mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin.



5. Sosial, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah daerah. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan bidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

Di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data, mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal. Berdasarkan kondisi tersebut peningkatan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kompetensi mutlak dilakukan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu ditingkatkan, disamping peningkatan terhadap pengawasan ketenagakerjaan terutama pengawasan terhadap perusahaan dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Selanjutnya, di sektor pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu tema sentral pembangunan daerah perlu diletakkan dan diorientasikan searah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan daerah. Paradigma pembangunan daerah yang lebih bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Aspek penting dalam program pemberdayaan adalah program yang disusun oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat serta sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat khususnya desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan perdesaan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan pengembangan wilayah desa, mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun



keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya pemuda, juga perlu dilakukan guna meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah. pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui pembinaan terhadap pemuda penggerak desa maupun organisasi kepemudaan lainnya.

6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Berdasarkan data, kasus kriminalitas pada Tahun 2014 mencapai 727 kasus, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013. Kasus pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang paling sering terjadi. Selain itu, belakangan ini terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang mulai muncul. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi daerah untuk mengatasinya. Perlu dilakukan berbagai langkah dalam upaya menurunkan angka kriminalitas. Kondisi keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas, yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu peningkatan sinergitas masyarakat dan aparat penegak hukum serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perlu terus didorong salah satunya melalui siskamling dan pemberdayaan anggota linmas, anggota polisi pamong praja maupun polisi desa.

Selain itu juga perlu dilaksanakan forum dialog/diskusi di seluruh tingkatan wilayah guna menciptakan kewaspadaan dini serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di suatu wilayah. Penyelenggaraan forum dialog/diskusi masyarakat mutlak dilakukan melihat masyarakat Lampung Timur yang heterogen. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif dapat mendorong peningkatan daya saing daerah guna menarik investasi dan pengembangan berbagai potensi unggulan daerah.

7. Pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana;

Berdasarkan data, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 95,07 persen pada Tahun 2014. Dengan kata lain, masih terdapat 4,93 persen atau sekitar 49,2 ribu masyarakat di atas usia 15 tahun yang masih buta huruf. Selain itu, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Timur baru mencapai 7,16 tahun. Diperlukan upaya keras pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan angka melek huruf dan mewujudkan mutu dan keunggulan pendidikan.



Di bidang kesehatan, juga perlu ditingkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat secara bermutu, merata dan terjangkau. Ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat dengan didukung oleh tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu cara guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga berbagai target pelayanan kesehatan dapat tercapai.

Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang mencapai 0,97, perlu terus dilakukan berbagai langkah guna peningkatan kualitas penduduk dan keluarga berencana, mulai dari penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat di fasilitas kesehatan/balai KB, peningkatan peran kader bina keluarga maupun pembinaan terhadap sekolah. Pengendalian penduduk mutlak dilakukan melihat jumlah penduduk Lampung Timur yang mencapai satu juta jiwa di Tahun 2015. Penduduk yang memiliki kualitas tinggi tentu akan menjadi potensi dan modal dasar pembangunan daerah, namun sebaliknya penduduk dengan kualitas yang rendah tentu saja akan menjadi beban bagi pembangunan daerah.

8. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Survey harapan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang dilakukan pada Tahun 2015 mendapatkan indeks kepuasan sebesar 6,1 dari nilai maksimum 10. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, namun masyarakat Lampung Timur masih cukup yakin bahwa pemerintah daerah mampu mengatasinya dengan tingkat keyakinan 65 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur, disamping perlu juga dilakukan penyebarluasan informasi kepada publik terkait dengan rencana dan capaian hasil pembangunan, sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat terus meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selanjutnya, guna meningkatkan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara merata perlu diterapkan pendekatan kebijakan berbasis pengarusutamaan gender dan hak asasi manusia baik dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, dapat juga dikembangkan hubungan kerjasama antar pemerintah daerah maupun internasional melalui kerjasama di berbagai bidang/ sektor yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, di bidang perencanaan pembangunan daerah, perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan



cakupan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dalam dokumen perencanaan perlu terus ditingkatkan. Pendekatan *top-down meet bottom-up* dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting dilakukan guna diperoleh perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat

Di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, kurun waktu 4 tahun terakhir, berdasarkan opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Perlu komitmen dan upaya keras seluruh pihak terkait dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).